BABI

PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

1.1.1 Profil Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DKPPKB) Kabupaten Belitung Timur

Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DKPPKB) Kabupaten Belitung Timur merupakan salah satu instansi pemerintah dengan tipe A di Kabupaten Belitung Timur yang menjadi otoritas urusan pemerintah daerah sebagai pelaksana di bidang kesehatan, bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana Kabupaten Belitung Timur (Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur, 2016: 4). Dipimpin oleh satu kepala dinas yang msemiliki kedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada bupati melalui sekretaris daerah. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DKPPKB) mempunyai tugas pokok membantu bupati melaksanakan urusan pemerintah dan pembantuan di bidang kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Untuk melaksanakan tugas, Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DKPPKB) Kabupaten Belitung Timur mempunyai fungsi yaitu, sebagai berikut (Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur, 2016: 4-5):

- a. perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kesehatan dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- b. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kesehatan dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kesehatan dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- d. pelaksanaan administrasi Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

1.1.2 Visi dan Misi Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DKPPKB) Kabupaten Belitung Timur

Setiap organisasi pasti memiliki visi dan misi. Visi dan misi tersebut dijadikan sebagai acuan untuk mencapai tujuan organisasi. Berikut adalah visi dan misi Dinas Kesehatan, Pengedalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DKPPKB) Kabupaten Belitung Timur (DKPPKB Kabupaten Belitung Timur, 2019: 72-73):

Visi:

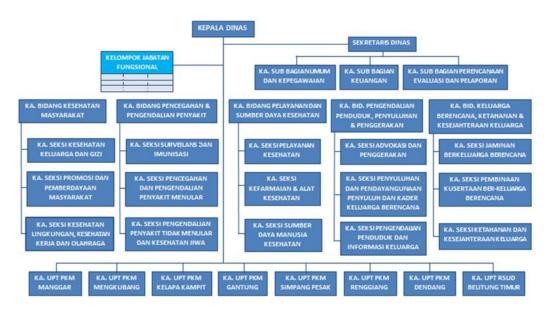
Belitung Timur Maju dan Unggul Berbasis Sumber Daya Lokal.

Misi:

- Menerapkan konsep ketatapemerintahan yang baik antara pemerintah, swasta dan masyarakat di Belitung Timur agar tercipta sigergitas dan keharmonisan dalam pembangunan.
- 2. Membangun dan membenahi infrastruktur daerah untuk memperbaiki kinerja pelayanan.
- 3. Diversifikasi lapangan dan lapangan pekerjaan bagi masyarakat Belitung Timur untuk meningkatkan pendapatan dan kualitas hidup, pemberdayaan dan penanggulangan kemiskinan.

1.1.3 Struktur Organisasi Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DKPPKB) Kabupaten Belitung Timur

Setiap organisasi sudah pasti memiliki struktur organisasi yang jelas. Struktur oraganisasi digunakan untuk melihat kedudukan seseorang yang ada di dalam suatu organisasi. Berikut adalah struktur organisasi Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DKPPKB) Kabupaten Belitung Timur dapat dilihat pada Gambar 1.1



Gambar 1.1 Struktur Organisasi DKPPKB Kabupaten Belitung Timur

Sumber: Data Internal DKPPKB Kab. Belitung Timur (2020)

Adapun susunan organisasi Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DKPPKB) Kabupaten Belitung Timur sesuai dengan struktur organisasi pada gambar 1.1 ialah terdiri dari (Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur, 2016: 5):

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat Dinas
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 - 3. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
- c. Bidang Kesehatan Masyarakat
 - 1. Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi;
 - 2. Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat; dan
 - 3. Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga.
- d. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
 - 1. Seksi Surveilans dan Imunisasi;
 - 2. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular; dan
 - 3. Seksi Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa.
- e. Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan

- 1. Seksi Pelayanan Kesehatan;
- 2. Seksi Kefarmasian dan Alat Kesehatan; dan
- 3. Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan.
- f. Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan
 - 1. Seksi Advokasi dan Penggerakan;
 - 2. Seksi Penyuluhan dan Pendayagunaan Penyuluh dan Kader Keluarga Berencana; dan
 - 3. Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga.
- g. Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
 - 1. Seksi Jaminan Ber-Keluarga Berencana;
 - 2. Seksi Pembinaan Kesertaan Ber-Keluarga Berencana; dan
 - 3. Seksi Ketahanan dan Kesejahteran Keluarga.
- h. Kelompok Jabatan Fungsional
- i. Unit Pelaksana Teknis Dinas

1.2 Latar Belakang Penelitaan

Setiap organisasi yang didirikan tentunya memiliki suatu tujuan yang ingin dicapai, salah satunya adalah instansi pemerintah. Instansi pemerintah merupakan suatu organisasi yang menjadi penggerak dalam melaksanakan tugas negara sebagai bentuk pengabdiannya kepada masyarakat. Untuk mencapai tujuannya tersebut instansi pemerintah harus mampu mengelola dan mengatur sumber daya yang dimiliki dengan efektif dan efisien agar bisa terus memberikan pelayanan terbaik kepada orang banyak. Salah satu sumber daya yang memegang peranan penting dalam keberhasilan pencapaian tujuan suatu organisasi adalah pegawai (Razak *et al*, 2018). Hal ini dikarenakan pegawai di dalam suatu organisasi termasuk instansi pemerintah merupakan pelaksana, pelaku, perencana dan tertentu dalam melakukan tugas pengabdian untuk mencapai tujuan dari suatu organisasi atau instansi pemerintah tersebut (Hasibuan, 2019: 10).

Setiap pegawai harus berperan aktif serta memiliki semangat dan gairah kerja yang tinggi dalam menjalankan tugasnya. Indikasi adanya semangat dan kegairahan kerja pegawai yang dapat mendukung terwujudnya tujuan organisasi dapat dilihat melalui disiplin kerja pegawai tersebut (Amin *et al*, 2019).

Kedisiplinan pegawai merupakan sifat seorang pegawai yang secara sadar mematuhi aturan yang terdapat di dalam organisasi (Amin *et al*, 2019). Sifat disiplin seorang pegawai instansi pemerintah tersebutlah yang menjadi modal utama dalam melaksanakan tanggungjawabnya kepada bangsa dan negara. Seorang pegawai dikatakan disiplin dalam melakukan pekerjaan dapat dinilai dari kehadiran yang teratur dan tepat waktu saat datang ke kantor, berpakaian rapi, menggunakan atribut serta kelengkapan kantor yang sudah ditentukan dengan baik, menyelesaikan pekerjaan tepat waktu sesuai dengan yang telah ditentukan, menghasilkan hasil dan kualitas yang memuaskan dengan mengikuti tata cara kerja yang telah ditentukan dalam pekerjaan (Hasibuan dan Munasib, 2020). Fitriasari dan Wulansari (2020) telah membuktikan bahwa kedisiplinan seorang pegawai dapat meningkatkan produktifitas kerja dari pegawai tersebut di sebuah perusahaan.

Menurut Sari *et al* (2020) menjelaskan bahwa disiplin adalah suatu ketaatan setiap pegawai di tempat kerja terhadap semua aturan yang berlaku melalui sikap, perbuatan dan perilaku yang baik sehingga terciptanya suatu keharmonisan, keteraturan, tidak ada perselisihan, serta keadaan - keadaan baik lain di dalam lingkup tempat kerja. Namun pada kenyataannya, tingkat tidak disiplinan pegawai di suatu instansi pemerintah sangatlah tinggi. Tingginya tingkat penyimpangan yang terjadi di dalam instansi pemerintah baik yang berbentuk penyimpangan tanggung jawab, kekuasaan, serta kepercayaan menunjukkan bahwa rendahnya kepatuhan pegawai dalam mentaati peraturan kerja dan norma sosial yang berlaku (Sulaeman dan Herdiani, 2018). Fenomena tersebut pula yang terjadi pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DKPPKB) Kabupaten Belitung Timur.

Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DKPPKB) Kabupaten Belitung Timur merupakan salah satu instansi pemerintah yang bertugas melaksanakan kebijakan daerah Kabupaten Belitung Timur di bidang pelayanan kesehatan masyarakat, bidang sumber daya kesehatan serta bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana (DKPPKB Kabupaten Belitung Timur, 2019: 6). Berikut adalah data pegawai Dinas Kesehatan,

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DKPPKB) Kabupaten Belitung Timur berdasarkan status dari bulan Juli 2020 – Desember 2020 pada tabel 1.1.

Tabel 1.1 Data Pegawai Berdasarkan Status Pegawai Bulan Juli 2020 – Desember 2020

No.	Bulan (2020)	Status Pegawai	Jumlah Pegawai	Total Pegawai	
1.	Juli	PNS	57	101	
		Honorer Pegawai	44	101	
2.	Agustus	PNS	57	101	
		Honorer Pegawai	44	101	
3.	September	PNS	59	122	
		Honorer Pegawai	63	122	
4.	Oktober	PNS	60	122	
		Honorer Pegawai	62	122	
5.	November	PNS	60	122	
		Honorer Pegawai	62	122	
6.	Desember	PNS	60	122	
		Honorer Pegawai	62	122	

Sumber: Data yang telah diolah dari Data Internal

DKPPKB Kab. Belitung Timur (2020)

Dari tabel 1.1 diatas dapat dilihat bahwa jumlah total pegawai pada bulan Juli 2020 – Agustus 2020 berjumlah 101 orang dengan jumlah pegawai yang berstatus PNS sebanyak 57 orang dan jumlah pegawai yang berstatus honorer sebanyak 44 orang. Pada bulan September 2020, pegawai yang memiliki status PNS bertambah 2 orang dan pegawai yang berstatus honorer bertambah menjadi 19 orang sehingga total seluruh pegawai berjumlah 122 orang. Kemudian pada bulan Oktober 2020 – Desember 2020, tidak terjadi penambahan maupun pengurangan pegawai sehingga total seluruh pegawai pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DKPPKB) Kabupaten Belitung Timur tetap berjumlah 122 orang.

Berdasarkan fenomena diatas dan dari pengamatan peneliti yang dilakukan saat kegiatan pelatihan kerja lapangan pada bulan Juli 2020 – Agustus 2020 di Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DKPPKB) Kabupaten Belitung Timur, bahwa terdapat masalah mengenai kedisiplinan pegawai di Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DKPPKB) Kabupaten Belitung Timur.

Masalah mengenai kedisiplinan pegawai tersebut diantaranya adalah pegawai yang masih sering datang terlambat, pulang cepat tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan sesuai dengan jadwal pulang kantor, tidak melakukan absensi terlebih dahulu sebelum pulang kantor dan tidak melakukan absensi pada saat datang ke kantor. Tidak hanya itu, peneliti juga mengamati bahwa masih terdapat pegawai yang tidak masuk kerja tanpa keterangan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Kepala Subbagian (Kasubag) Umum dan Kepegawaian Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DKPPKB) Kabupaten Belitung pada bulan Agustus 2020 menjelaskan tingkat disiplin pegawai dalam mentaati peraturan mengenai absensi dan kehadiran kurang baik. Hal ini dikarenakan masih ditemukannya beberapa pegawai yang tidak hadir tanpa keterangan, pelanggaran aturan waktu efektif masuk kantor yaitu pukul 07:30 WIB dan waktu pulang kantor yaitu 16:00 WIB, serta tidak melakukan absensi saat datang dan pulang kantor sesuai dengan aturan yang telah ditentukan masih cukup tinggi. Untuk mendukung pernyataan tersebut, peneliti mencari data mengenai kehadiran pegawai Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DKPPKB) Kabupaten Belitung Timur. Data kehadiran tersebut akan dijelaskan pada tabel 1.2.

Tabel 1.2 Data Absensi Pegawai DKPPKB Kab. Belitung Timur

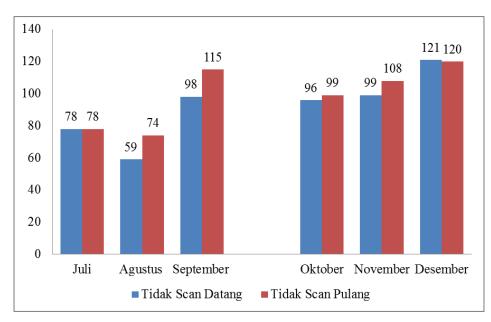
Bulan	Jumlah	Datang	Pulang	Tanpa		
(2020)	Pegawai	Terlambat	Cepat	Keterangan		
Juli	101	80	1	2		
Juli		(79,21%)	(0,99%)	(1,98%)		
Agustus	101	88	2	1		
Agustus	101	(87,13%)	(1,98%)	(0,99%)		
Cantamban	122	87	4	1		
September		(71,31%)	(3,28)	(0,82)		
Oktober	122	87	0	0		
Oktober	122	(71,31%)	U			
November	122	92	3	0		
november	122	(75,41)	(2,46%)			
Desember	122	94	3	0		
Desember	122	(77,05%)	(2,46%)			

Sumber: Data yang telah diolah dari Data Internal

DKPPKB Kab. Belitung Timur (2020)

Berdasarkan tabel 1.2 diatas dapat dilihat bahwa pegawai yang datang terlambat mulai dari bulan Juli 2020 sampai dengan bulan Desember 2020 terjadi fluktuasi dan jumlah keterlambatan pegawai yang paling banyak terjadi pada bulan Agustus 2020 yaitu sebanyak 87,13% pegawai. Untuk pegawai yang pulang tidak sesuai dengan waktu yang ditentukan (pulang cepat) selama kurun waktu 3 bulan tersebut mengalami kenaikan, dan pegawai yang paling banyak pulang tidak sesuai dengan waktu yang ditentukan terjadi pada bulan September 2020 yaitu sebanyak 3,28% pegawai. Sedangkan jumlah ketidakhadiran pegawai tanpa keterangan mengalami penurunan disetiap bulannya dan jumlah pegawai yang banyak tidak hadir tanpa keterangan terbanyak terjadi pada bulan Juli yaitu sebanyak 1,98% pegawai.

Dalam bulan Oktober 2020 sampai dengan Desember 2020, jumlah keterlambatan pegawai kembali meningkat disetiap bulannya dan jumlah keterlambatan pegawai yang paling banyak terdapat pada bulan Desember 2020 yaitu sebanyak 77,05% pegawai. Untuk pegawai yang pulang tidak sesuai dengan waktu yang ditentukan (pulang cepat) selama kurun waktu 3 bulan tersebut mengalami kenaikan pada bulan November 2020 yaitu sebanyak 2,46% pegawai. Sedangkan dalam kurun waktu 3 bulan tersebut tidak terdapat pegawai yang tidak hadir tanpa keterangan. Walaupun pada bulan November 2020 hingga Desember 2020 tidak terdapat pegawai yang tidak hadir tanpa keterangan di DKPPKB Kabupaten Belitung Timur, akan tetapi masih terdapat beberapa sikap ketidakdisiplinan pegawai dalam melaksanakan ketentuan yang telah yang telah dibuat. Sikap ketidakdisiplinan tersebut akan dijelaskan pada gambar 1.2.



Gambar 1.2 Grafik Scan Absensi Pegawai DKPPKB Kab. Belitung Timur

Sumber: Data yang telah diolah dari Data Internal DKPPKB Kab. Belitung Timur (2020)

Berdasarkan gambar 1.2 diatas, dapat diketahui bahwa jumlah pegawai yang tidak mentaati ketentuan dalam melakukan absensi *scan* datang dan pulang pada bulan Juli 2020 hingga September 2020 terjadi fluktuasi. Dalam kurun waktu 3 bulan tersebut jumlah pegawai yang tidak melakukan absensi *scan* datang dan absensi *scan* pulang paling banyak terjadi di bulan September 2020 yaitu sebanyak 80,33% pegawai tidak melakukan absensi *scan* datang dan 94,26% pegawai tidak melakukan absensi *scan* pulang. Sedangkan pada bulan Oktober 2020 hingga Desember 2020, jumlah pegawai yang tidak melakukan absensi *scan* datang serta absensi *scan* sebelum pulang mengalami peningkatan setiap bulannya dan dalam kurun waktu 3 bulan tersebut jumlah pegawai paling banyak tidak melakukan absensi *scan* datang dan absensi *scan* sebelum pulang terdapat pada bulan Desember 2020 yaitu sebanyak 99,18% pegawai yang tidak melakukan absensi *scan* datang dan sebanyak 98,36% pegawai yang tidak melakukan absensi *scan* sebelum pulang.

Berdasarkan Surat Edaran Menteri PANRB No.19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara dalam Upaya Pencegahan Covid-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah yang dikeluarkan pada 16 Maret 2020 dimaksudkan sebagai pedoman bagi seluruh instansi pemerintah agar seluruh aparatur sipil negara (ASN) di dalamnya agar dapat melaksanakan tugas kedinasan dengan bekerja di rumah atau tempat tinggal masing-masing (work from Home/WFH) sebagai upaya pencegahan dan meminimalisasi penyebaran Covid-19 (www.menpan.go.id). Untuk menindaklanjutin Surat Edaran Menteri No.19 Tahun 2020, Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur mengeluarkan Surat Edaran Bupati Belitung Timur (Beltim) Nomor 800/078/BPKPSDM/II/2020 yang dikeluarkan pada 20 Maret 2020, dimana kebijakan bekerja dari rumah (work ftrom home/WFH) bagi seluruh pegawai di jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) Kabupaten Belitung Timur termasuk Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DKPPKB) Kabupaten Belitung Timur yang akan mulai berlaku per tanggal 23 Maret 2020 (www. www.belitungtimurkab.go.id).

Diketahui bahwa Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DKPPKB) Kabupaten Belitung Timur melakukan WFH dari bulan Maret 2020 – Juni 2020. Sehingga pada kurun waktu tersebut kebijakan mengenai ketentuan absensi kehadiran berubah yang awalnya menggunakan absensi kehadiran secara elektronik *scan* wajah menjadi absensi manual dimana seluruh pegawai dinyatakan hadir kecuali pegawai yang pada saat itu terpapar Covid-19 maka akan dinyatakan sakit. Pada bulan Juli 2020, seluruh pegawai Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DKPPKB) Kabupaten Belitung Timur wajib melaksanakan tugas kedinasan dari kantor (*work from office*/WFO) tanpa adanya pengurangan pegawai yang masuk ke kantor atau pembagian jam kerja pegawai (*shift*) dan seluruh pegawai diwajibkan untuk memperketat protokol kesehatan yang berlaku.

Hal ini dikarenakan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DKPPKB) merupakan salah satu OPD yang bertugas di bidang kesehatan dan menjadi salah satu OPD yang masuk kedalam tim Satgas Satgas Tanggap Bencana yang memiliki peran sebagai Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di Kabupaten Belitung Timur (www.belitungtimurkab.go.id). Sehingga pada penelitian ini, peneliti memutuskan untuk mengambil data kehadiran pegawai pada

bulan Juli 2020 – Desember 2020 dikarenakan pada bulan tersebut seluruh pegawai sudah kembali bekerja dari kantor (*work from office*/WFO) dan kebijakan mengenai absensi kehadiran pegawai secara elektronik menggunakan *scan* wajah sudah berlaku.

Tercapainya disiplin kerja pegawai tidak terlepas dari peran seorang pemimpin (Zulaiha *et al*, 2020). Hasanah (2018) juga menyebutkan bahwa peranan pemimpin sangat penting dalam menegakkan sikap disiplin kerja pegawai di suatu organisasi. Pemimpin merupakan seseorang yang memiliki pengikut atau bawahan untuk suatu tujuan dan keberhasilannya sangat dipengaruhi oleh kepemimpinan yang dimilikin oleh pemimpin tersebut (Edison *et al*,2017: 87). Untuk mewujudkan tingkat disiplin pegawai yang tinggi dalam bekerja, kepemimpinan dari seorang pemimpin perlu diperhatikan (Khaerani dan Badar, 2020). Hal ini dikarenakan kepemimpinan merupakan faktor penting dalam mempengaruhi bawahan karena apabila bawahan merasa pemimpin mereka merupakan sosok yang dapat diteladani, maka bawahan tersebut akan menyesuaikan perilaku dan tindakan mereka dengan keinginan pemimpinnya (Zilarou, 2017).

Seorang pemimpin pun harus menyadari bahwa perilaku dan tindakannya akan sangat diperhatikan, dicontoh dan diteladani oleh bawahannya sehingga pemimpin harus memberi contoh yang baik seperti berdisiplin dalam bekerja (Damri, 2017). Selain itu, pemimpin juga harus berani tegas dalam bertindak, konsisten dalam mengambil tindakan serta adil dalam memberikan hukuman (Putra et al, 2016). Akan tetapi berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian diketahui bahwa pimpinan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DKPPKB) Kabupaten Belitung Timur saat ini kurang bersikap tegas dalam menghadapi pegawai yang melakukan tindakan indisplin dalam bekerja. Pemimpin masih memberikan toleransi terhadap pegawai yang kurang disiplin. Hal tersebut yang akhirnya membuat pegawai merasa aman dan bertindak bebas ketika tidak mentaati serta melanggar peraturan ketentuan jam kerja yang sudah ditetapkan. Kemudian dari hasil wawancara dengan 4 orang pegawai sebagai perwakilan juga diketahui

bahwa pimpinan kurang memberikan contoh disiplin kerja yang baik kepada pegawainya misalnya pimpinan sering tidak ada ditempat atau kantor pada jam efektif kerja tanpa alasan dan urusan yang jelas, terkadang pimpinan juga tidak menggunakan pakaian dan atribut kantor sesuai dengan yang telah ditentukan, serta pimpinan juga sering datang terlambat ke kantor.

Untuk memperkuat hasil wawancara tersebut, peneliti menyebarkan survei preliminary test pertanyaaan terbuka mengenai masalah - masalah sumber daya manusia yang disebarkan secara acak oleh peneliti kepada 30 pegawai Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DKPPKB) Kabupaten Belitung Timur. Dari hasil survei preliminary test didapatkan hasil yaitu sebanyak 14 pegawai memilih kepemimpinan sebagai salah satu masalah utama yang terjadi di Dinas Kesahatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DKPPKB) Kabupaten Belitung Timur. Dari hasil survei preliminary juga dapat disimpulkan bahwa menurut pegawai kepemimpinan yang diterapkan oleh pimpinan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DKPPKB) Kabupaten Belitung Timur masih tergolong kurang baik.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Harmban *et al* (2021) terhadap guru SD di BPR Kecamatan Ranau Tengah Selatan Kabupaten Oku mendapatkan hasil bahwa terdapat pengaruh antara kepemimpinan terhadap disiplin kerja. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Damri (2017) terhadap pegawai Biro Administrasi Pemerintahan Umum Provinsi Riau mendapatkan hasil bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara kepemimpinan terhadap disiplin kerja. Selanjutnya Khaerani dan Badar (2017) juga melakukan penelitian kepada pegawai Badan Pengawasan Pemilihan Umum (BAWASLU) Kota Bima dan mendapatkan hasil bahwa terdapat pengaruh antara kepemimpinan terhadap disiplin kerja. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Rahmi *et al* (2020) terhadap karyawan yang bekerja di Sungai Kunjang Subdistrict Kota Samarinda mendapatkan hasil bahwa terdapat pengaruh antara kepemimpinan dengan disiplin kerja karyawan.

Liyas (2017) melakukan penelitian terhadap karyawan PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Duri mendapatkan hasil bahwa kepemimpinan memiliki pengaruh signifikan terhadap disiplin kerja. Penelitian yang dilakukan oleh Nazar (2017)

terhadap karyawan pada Posmetro Mandau Duri mendapatkan hasil bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara kepemimpinan terhadap disiplin kerja karyawan. Kemudian, penelitian yang dilakukan oleh Arianto dan Setiyowati (2020) terhadap karyawan di PT. Indoexim Internasional mendapatkan hasil bahwa kepemimpinan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap disiplin kerja karyawan yang artinya terdapat keterkaitan antara kepemimpinan dengan disiplin kerja. Semakin baik kepemimpinan yang diterapkan oleh pemimpin maka semakin tinggi pula tingkat disiplin kerja karyawannya.

Selain gaya kepemimpinan, salah satu kunci yang menjadi pendorong moral kedisiplinan dan prestasi kerja pegawai dalam mendukung mewujudkan tujuan organisasi adalah kepuasan kerja pegawai (Hasibuan, 2019: 203). Hardiansyah *et al* (2018) menjelaskan bahwa sikap disiplin seorang pegawai dipengaruhi oleh kepuasan kerja yang dicapai karna hal tersebut akan mempengaruhi kesediaan dan kerelaan pegawai yang akan berdampak pada tingginya sikap disiplin kerja pegawai di suatu organisasi, perusahan ataupun instansi pemerintah. Pernyataan ini sejalan dengan penjelasan yang disampaikan oleh Hasibuan (2019: 203) yaitu tingkat kedisiplinan seorang pegawai dipengaruhi oleh kepuasan kerja yang artinya ialah apabila pegawai memperoleh kepuasan dari pekerjaannya maka tingkat kedisiplinan pegawai akan baik, sebaliknya tingkat kedisplinan pegawai akan rendah apabila pegawai merasa kepuasan kerja kurang tercapai dari pekerjaannya tersebut.

Kepuasan kerja adalah keadaan psikologis pegawai yang dipengaruhi oleh persepsi dan harapannya terhadap pekerjaan yang diberikan yang menimbulkan rasa suka atau tidak suka terhadap pekerjaan yang demikian akan mempengaruhi perilaku kerja pegawai tersebut (Saputra dan Mulia, 2019). Pegawai yang tidak memperoleh kepuasan kerja di dalam suatu organisasi tidak akan pernah mencapai kepuasan psikologis yang pada akhirnya menimbulkan sikap atau tingkah laku negatif yang dapat menimbulkan terjadinya frustasi di dalam organisasi, sebaliknya jika pegawai merasakan kepuasan dalam bekerja tentunya pegawai tersebut akan bekerja dengan baik, aktif, dan penuh semangat serta dapat memiliki prestasi yang lebih baik dari pegawai yang tidak merasa puas akan pekerjaannya (Sutrisno, 2009; dalam Ilahi *et al.*, 2017: 32).Selain itu, Prasetio *et al.* (2019) menjelaskan bahwa

kepuasan kerja juga dapat diartikan sebagai persepsi pegawai terhadap pekerjaan mereka berdasarkan gaya kepemimpinan, aturan dan prosedur, serta hubungan antar pegawai dalam sebuah organisasi. Sehingga hal ini menunjukkan bahwa pegawai akan memiliki kepuasan kerja yang baik apabila dirasakan oleh pegawai tersebut gaya kepemimpinan yang baik dan aturan yang jelas pada perusahaan. Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang meneliti tentang hubungan antara kepuasan kerja terhadap disiplin kerja.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Sipahutar (2018) pada pegawai di STIE Al Washliyah Sibolga/Tapanuli Tengah mendapat bahkan hasil bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara kepuasan kerja terhadap disiplin kerja dan kinerja pegawai dengan nilai korelasi yang tinggi. Sedangkan, penelitian yang dilakukan oleh Anuar (2020) kepada karyawan di PT. Mega *Finance* Cabang Kandis Kabupaten Siak mendapatkan hasil bahwa kepuasan kerja memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap disiplin kerja. Selanjutnya Damri (2017) dalam penelitiannya yang dilakukan kepada Pegawai Biro Administrasi Pemerintahan Umum Provinsi Riau mendapatkan hasil bahwa kepuasan kerja memiliki pengaruh yang signifikan terhadap disiplin kerja, hal ini membuktikan bahwa setiap terjadi peningkatan kepuasan kerja pegawai maka akan meningkatkan tingkat disiplin pegawai tersebut.

Ilahi et al (2017) dalam penelitian yang dilakukan di PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Malang menemukan bahwa kepuasan kerja memiliki pengaruh secara langsung dan signifikan terhadap disiplin kerja, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa kepuasan kerja yang diperoleh oleh pegawai mempengaruhi tingkat disiplin pegawai tersebut. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Manik (2017) pada pegawai Kantor Camat Pendalian IV Koto Kabupaten Rokan Hulu mendapatkan hasil bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara kepuasan kerja terhadap disiplin kerja pegawai yang artinya adalah semakin pegawai merasa puas dalam bekerja maka akan meningkatkan tingkat disiplin yang tinggi pada pegawai. Kemudian Lamin (2018) mendapatkan hasil bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara kepuasan kerja terhadap disiplin kerja karyawan di CV. Kampar Motor Kabupaten Kampar. Berdasarkan

hasil penelitian terdahulu yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa semakin tinggi tingkat kepuasan kerja pegawai maka semakin tinggi pula tingkat disiplin pegawai di dalam suatu organisasi.

Hasibuan (2019: 202) menjelaskan bahwa untuk mengukur tingkat kepuasan kerja yang mutlak tidak ada, dikarenakan setiap individu pegawai memiliki standar kepuasan yang berbeda. Akan tetapi kepuasan kerja dapat diukur dengan kedisplinan pegawai, moral dalam bekerja, dan *turn over*. Dari data yang diperoleh pada tabel 1.2 yaitu Data Absensi Pegawai DKKPKB Kabupaten Belitung Timur dan gambar 1.2 yaitu Grafik *Scan* Absensi Pegawai DKPPKB Kabupaten Belitung Timur maka dapat diketahui bahwa pegawai di Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga (DKPPKB) Kabupaten Belitung Timur memiliki tingkat kepuasan kerja yang rendah sehingga hal ini berpengaruh terhadap tingkat disiplin pegawainya dalam mematuhi peraturan.

Berdasarkan dari survei preliminary test pertanyaaan terbuka mengenai masalah-masalah sumber daya manusia yang disebarkan secara acak oleh peneliti kepada 30 pegawai di Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DKPPKB) Kabupaten Belitung Timur mendapatkan hasil yaitu sebanyak 12 pegawai memilih kepuasan kerja sebagai salah satu masalah utama yang terjadi di Dinas Kesahatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DKPPKB) Kabupaten Belitung Timur. Selanjutnya, peneliti melakukan wawancara terhadap 4 pegawai sebagai perwakilan yang terdiri dari Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian, Kepala Bidang Pengendalian dan Penyebaran Penyakit dan 2 orang pegawai berstatus PNS lainnya. Berdasarkan hasil wawancara tersebut didapatkan bahwa terdapat fasilitas penunjang kerja yang kurang mendukung seperti terdapat beberapa komputer yang rusak, terbatasnya persediaan printer, AC di beberapa ruangan yang rusak sehingga mengurangi kenyamanan pegawai dalam bekerja. Kemudian pegawai merasa kurang puas terhadap gaji, tukin (tunjangan kinerja) yang diterima dan arahan atau bimbingan yang diberikan pimpinan dalam mengerjakan tugas.

Untuk memperkuat data tersebut, peneliti mengumpulkan data kepuasan kerja dengan melakukan survey melalui *preliminary test* yang disebar langsung

secara acak kepada 30 pegawai di Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DKPPKB) Kabupaten Belitung Timur. Berikut hasil yang didapatkan berdasarkan *preliminary test* yang telah disebarkan kepada pegawai Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Belitung Timur dijelaskan pada tabel 1.3.

Tabel 1.3 Preliminary Kepuasan Kerja DKPPKB Kab. Belitung Timur

No.	Pernyataan Kepuasan Kerja	Pilihan Jawaban			Skor	%	
110.	i etnyataan isepuasan isetja		S	TS	STS	SKUI	/0
1	Saya merasa puas dengan pekerjaan yang saya kerjakan.		12	17	0	74	61,7
2	Saya puas dengan gaji yang saya terima.		9	21	0	69	57,5
3	Atasan memberikan arahan dan bimbingan dalam menyelesaikan tugas.		7	22	0	69	57,5
4	Saya menjalin hubungan kerja yang baik dengan rekan kerja.		24	4	0	88	73,3
5	Saya diberikan kesempatan untuk naik jabatan.	1	11	18	0	75	60,8
Total					375	62,2	

Sumber: Data yang telah diolah dari preliminary test (2021)

Berdasarkan hasil *preliminary test* yang diperoleh dari 30 pegawai pada tabel 1.3 mengenai tingkat kepuasan kerja di Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DKPPKB) Kabupaten Belitung Timur terdapat hasil presentase respon tertinggi sebesar 73,3% terkait pernyataan saya menjalin hubungan kerja yang baik dengan rekan kerja.. Hal ini menunjukkan bahwa pegawai Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DKPPKB) Kabupaten Belitung Timur tidak memiliki kesulitan dalam menjalin hubungan kerja dengan rekan kerja karena memiliki kepuasaan yang tinggi pada item pernyataan tersebut. Data dari *preliminary test* yang menunjukkan kepuasan kerja dengan respon terendah terdapat pada 2 item pernyataan yaitu saya puas dengan gaji yang saya terima sebesar 57,5% dan pernyataan atasan memberikan arahan dan bimbingan dalam menyelesaikan tugas sebesar 57,5%.

Dari hasil 2 item pernyataan dengan perolehan respon terendah tersebut menunjukkan bahwa pegawai Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DKPPKB) Kabupaten Belitung Timur merasa tidak puas dengan gaji yang diterima dan tidak merasa puas dengan bimbingan serta bantuan atasan dalam menyelesaikan pekerjaan. Hasil total keseluruhan dari *preliminary test* kepuasan kerja tersebut yaitu sebesar 62,2% yang artinya adalah kepuasan kerja pegawai Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DKPPKB) Kabupaten Belitung Timur masuk kedalam kategori rendah. Melihat dari hasil total tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pegawai masih belum puas dengan tingkat kepuasan kerja pada Dinas Kesehatan, Pengedalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DKPPKB) Kabupaten Belitung Timur.

Berdasarkan beberapa pemaparan dari data sekunder, *preliminary test*, hasil wawancara dan penelitian terdahulu yang telah dibahas sebelumnya, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai kepemimpinan, tingkat kepuasan kerja dan tingkat disiplin kerja di Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DKPPKB) Kabupaten Belitung Timur dan apakah kepemimpinan dan kepuasan kerja menjadi faktor yang mempengaruhi tingkat disiplin kerja pegawai Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DKPPKB) Kabupaten Belitung Timur. Adapun judul yang akan diangkat untuk penelitian ini oleh peneliti yaitu "Pengaruh Kepemimpinan dan Kepuasan Kerja Terhadap Disiplin Kerja Pegawai Pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DKPPKB) Kabupaten Belitung Timur".

1.3 Perumusan Masalah

Mengacu pada latar belakang penelitian, salah satu sumber daya terpenting dalam suatu instansi pemerintah adalah pegawai. Hal ini dikarenakan pegawai merupakan pelaksana tugas negara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dalam pelaksanaanya, setiap pegawai harus mempunyai tingkat disiplin kerja yang tinggi agar tujuan tersebut tercapai sesuai dengan yang telah direncanakan. Akan tetapi masih banyak pegawai instansi pemerintah yang mempunyai tingkat indisiplin kerja yang tinggi, salah satunya adalah Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DKPPKB) Kabupaten Belitung Timur. Berdasarkan data yang didapatkan menunjukkan bahwa tingkat disiplin kerja pegawai DKPPKB Kabupaten Belitung Timur

tergolong rendah. Terdapat pegawai yang masih datang terlambat dan pulang tidak sesuai dengan jam pulang kantor, serta terdapat pegawai yang tidak melakukan ketentuan yang diberlakukan oleh instansi yaitu melakukan absensi scan datang dan sebelum pulang.

Disiplin kerja pegawai tidak terlepas dari kepuasan kerja serta peran dari pemimpin di dalam setiap instansi. Hasil preliminary test menunjukkan bahwa variabel kepuasan kerja berada pada kategori rendah yaitu 62,2% yang artinya tingkat kepuasan kerja yang dirasakan oleh pegawai tergolong rendah. Dan hasil wawancara yang telah dilakukan menunjukkan bahwa kurang bersikap tegas dalam menghadapi pegawai yang melakukan tindakan indisplin dalam bekerja. Pemimpin masih memberikan toleransi terhadap pegawai yang kurang disiplin. Hal tersebut yang akhirnya membuat pegawai merasa aman dan bertindak bebas ketika tidak mentaati serta melanggar peraturan ketentuan jam kerja yang sudah ditetapkan. Pimpinan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DKPPKB) Kabupaten Belitung Timur juga kurang memberikan contoh disiplin kerja yang baik kepada pegawainya misalnya pimpinan sering tidak ada ditempat atau kantor pada jam efektif kerja tanpa alasan dan urusan yang jelas, terkadang pimpinan juga tidak menggunakan pakaian dan atribut kantor sesuai dengan yang telah ditentukan, serta pimpinan juga sering datang terlambat ke kantor.

Berdasarkan penjelasan yang telah disampaikan, pada penelitian ini peneliti ingin melihat bagaimana tingkat persepsi pegawai mengenai pengaruh kepemimpinan yang telah diterapkan dan tingkat kepuasan kerja terhadap disiplin kerja di Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DKPPKB) Kabupaten Belitung Timur. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian yang lebih lanjut untuk mengetahui bahwa kepemimpinan dan kepuasan kerja benar terhadap disiplin kerja, sebab hasil *preliminary test* dan hasil wawancara diatas belum mewakili kondisi seluruh pegawai yang ada di Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DKPPKB) Kabupaten Belitung Timur.

1.4 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang dipaparkan diatas, adapun pertanyaan penelitian yang terdapat dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- 1. Bagaimana kepemimpinan di Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DKPPKB) Kabupaten Belitung Timur?
- 2. Bagaimana tingkat kepuasan kerja di Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DKPPKB) Kabupaten Belitung Timur ?
- 3. Bagaimana disiplin kerja di Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DKPPKB) Kabupaten Belitung Timur ?
- 4. Bagaimana pengaruh kepemimpinan terhadap disiplin kerja di Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DKPPKB) Kabupaten Belitung Timur ?
- 5. Bagaimana pengaruh kepuasan kerja terhadap disiplin kerja di Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DKPPKB) Kabupaten Belitung Timur ?
- 6. Bagaimana pengaruh kepemimpinan dan kepuasan kerja terhadap disiplin kerja di Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DKPPKB) Kabupaten Belitung Timur ?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dipaparkan diatas, terdapat beberapa tujuan penelitian dalam penelitian ini yaitu, sebagai berikut:

- Untuk mengetahui kepemimpinan di Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DKPPKB) Kabupaten Belitung Timur.
- Untuk mengetahui kepuasan kerja di Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DKPPKB) Kabupaten Belitung Timur.
- Untuk mengetahui disiplin kerja pegawai di Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DKPPKB) Kabupaten Belitung Timur.

- 4. Untuk mengetahui pengaruh kepemimpinan terhadap displin kerja di Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DKPPKB) Kabupaten Belitung Timur.
- Untuk mengetahui pengaruh kepuasan kerja terhadap displin kerja di Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DKPPKB) Kabupaten Belitung Timur.
- 6. Untuk mengetahui pengaruh kepemimpinan dan kepuasan kerja terhadap disiplin kerja di Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DKPPKB) Kabupaten Belitung Timur.

1.6 Manfaat Penelitian

Adapun beberapa manfaat yang terdapat dalam penelitan ini sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan dan menjadi informasi bagi peneliti lainnya sebagai bahan studi perbandingan maupun bahan referensi serta acuan untuk penelitian selanjutnya mengenai pengaruh kepemimpinan dan kepuasan kerja terhadap disiplin kerja. Mendorong peneliti lain untuk mengembangkan serta menyempurnakan penelitian ini dengan lebih baik di masa yang datang.

2. Manfaat Praktis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan wawasan baru bagi peneliti agar nantinya mampu menerapkan teori yang didapatkan diperkuliahan dengan kenyataan yang sebenernya. Kemudian, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat membantu serta memberi masukan, saran tentang pengelolaan kepemimpinan, kepuasan kerja dan disiplin kerja di Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DKPKKB) Kabupaten Belitung Timur.

1.7 Sistematika Penulisan Tugas Akhir

Sistematika ringkas laporan penelitian terdiri dari, yaitu

a. BAB I PENDAHULUAN

Isi dalam bab ini ialah menjelaskan tentang beberapa poin dasar penelitian seperti gambaran umum objek penelitian, latar belakang penelitian, perumusan masalah penelitian, pertanyaan masalah penelitian, tujuan penelitian, dan ruang lingkup penelitian.

b. BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Isi dalam bab ini ialah terdapat penjelasan mengenai tinjauan teori dari masing-masing variabel penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan hipotesis yang akan diuji.

c. BAB III METODE PENELITIAN

Isi dalam bab ini ialah menjelaskan dan menguraikan tentang jenis penelitian, operasional variabel, populasi dan sampel, pengumpulan data, uji validitas dan reabilitas kemudian teknik analisis data.

d. BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisikan tentang penjelasan karakterik responden, hasil penelitian dan pembahasannya.

e. BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bab terakhir yang berisikan tentang kesimpulan dari hasil penelitian serta saran bagi objek penelitian pada penelitian ini.

Daftar Pustaka

Lampiran